

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak adanya gerakan reformasi tahun 1998, muncul banyak tekanan dari publik yang menghendaki agar Pemerintah maupun swasta dapat menghapuskan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang secara politis lebih dikenal dengan istilah KKN. Selanjutnya diharapkan akan mampu mengelola usaha mereka secara terbuka, adil, dapat dipertanggung jawabkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Perubahan sikap secara bersama-sama dan berperilaku sesuai dengan harapan itu, diperlukan agar dapat bangkit kembali dari kemelut krisis, siap bersaing menghadapi era globalisasi dan dapat meningkatkan kesejahteraan bersama.

Di Indonesia, upaya untuk menerapkan *good corporate governance* sebagai kebiasaan kehidupan suatu organisasi beserta para individu yang bekerja di dalamnya belum tertata dan didokumentasikan secara sistematis. Belum diterapkannya *good corporate governance* di Indonesia merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi dan yang membuat krisis ekonomi itu hingga kini belum juga berakhir (Tjager, 2001). Hingga pertengahan tahun 1997 di kawasan Asia, termasuk Indonesia, telah menjadi pemicu munculnya wacana *good corporate governance*. Ditemukannya bahwa salah satu akar permasalahan terjadinya krisis tersebut adalah lemahnya tata kelola perusahaan (*corporate governance*) di Indonesia, di samping lemahnya tata kelola publik (*public governance*) di Indonesia,

governance). Terkait dengan permasalahan ini, maka kesepakatan antara Pemerintah dengan IMF tentang reformasi ekonomi dalam rangka pemulihan krisis memasukkan perbaikan *corporate governance* dalam salah satu agendanya (Hardjapamekas, 2001).

Lemahnya *corporate governance* ditandai oleh tindakan mementingkan diri sendiri dari pihak manajer, karena dengan semakin majunya perekonomian, maka hal manajemen dan pengelolaan perusahaan menjadi semakin dipisahkan dari pemilik perusahaan yaitu pemegang saham, yang pada akhirnya menyebabkan kurang transparannya penggunaan dana serta keseimbangan yang tepat dalam akan keputusan-keputusan yang ada. Berdasar teori keagenan (*agency theory*) menyatakan bahwa perusahaan dijalankan oleh manajer yang bertindak sebagai agen dari para pemegang saham, manajer melakukan aktivitas yang bertujuan untuk memaksimalkan return bagi pemegang saham dan sebagai balasannya, manajer mendapatkan balas jasa berupa gaji. Selain manajer dan pemegang saham, terdapat *stakeholder* lain yang mempunyai tujuan yang berbeda, seperti pemerintah (tujuan pajak, pertumbuhan ekonomi), karyawan (perolehan balas jasa berupa gaji dan upah), kreditur (informasi mengenai likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas perusahaan), serta masyarakat umum.

Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan (*alignment*) berbagai kepentingan tersebut. Pertama, dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (*managerial ownership*) (Jensen dan Meckling, 1976), sehingga kepentingan

pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer. Kedua, kepemilikan saham oleh investor institusional. Moh'd et al. (1998) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang. Ketiga, melalui peran monitoring oleh dewan komisaris (*board of directors*) serta memaksimalkan fungsi komite audit yang ada dalam perusahaan. Kesemua tujuan itu diharapkan dapat terakomodasi lewat penerapan *good corporate governance* yang baik.

Corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Konsep *corporate governance* timbul sebagai upaya untuk mengatasi perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri dan sebagai alat kontrol untuk memungkinkan terciptanya pembagian keuntungan dan kekayaan yang seimbang bagi *stakeholders* dan menciptakan efisiensi bagi perusahaan. Penerapan konsep *good corporate governance* berdasar pada prinsip-prinsip yang dimiliki. Pertama, transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Kedua, akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Ketiga, keadilan yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Keempat, tanggung jawab yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

Secara teoritis, praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor. Perusahaan dengan *corporate governance* yang baik akan menarik investor untuk menanamkan modal di perusahaan sehingga diharapkan kondisi keuangan perusahaan menjadi lebih baik dan semakin kuat, yang selanjutnya akan terefleksikan dalam laporan keuangan perusahaan dengan kinerja keuangan yang diharapkan akan menjadi lebih baik juga.

Kinerja memiliki arti yang sangat penting bagi setiap perusahaan sehingga hampir semua perusahaan menggunakan kinerja untuk mengukur kemampuan, keberhasilan serta kegagalan mereka didalam mengelola sumber dayanya serta pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Kinerja perusahaan menurut Drucker (1982: 134) adalah tingkat prestasi (karya) atau hasil yang dicapai kadang-kadang dipergunakan untuk dicapainya suatu hasil yang positif. Manfaat kinerja menurut Maher dan Deakin (1997: 298) bahwa evaluasi kinerja dan sistem intensif dirancang untuk mendorong para pegawai agar berperilaku seolah-olah tujuan

mereka selaras dengan tujuan perusahaan dimana hal tersebut menghasilkan keselarasan perilaku, yaitu individu berperilaku sebaik mungkin demi kepentingan organisasi tanpa memperdulikan tujuannya sendiri.

Analisis rasio keuangan yang mencakup analisis kekuatan dan kelemahan di bidang finansial akan sangat membantu dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan di masa lalu, kini, dan prospeknya di masa yang akan datang. Jenis-jenis rasio keuangan yang biasanya dipakai sebagai alat ukur kinerja perusahaan adalah: rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan analisis rasio pasar.

Perkembangan ilmu pengetahuan yang demikian pesat dan tuntutan pasar ekonomi dunia mendorong para ahli untuk menemukan dan mengembangkan alat ukur lain yang lebih akurat dalam mengukur kinerja perusahaan. Hal ini tak luput juga didorong oleh desakan para investor dan penyedia dana agar mempunyai acuan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya dalam mengalokasikan dananya.

EVA adalah ukuran nilai tambah ekonomis yang dihasilkan oleh perusahaan sebagai akibat aktivitas atau strategi manajemen selama periode tertentu. Menurut Mirza (1997) EVA memiliki keunggulan sebagai pengukur kinerja perusahaan. Pertama, EVA memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah dengan memperhitungkan beban biaya modal sebagai risiko investasi. Kedua, EVA dapat diterapkan secara mandiri tanpa memerlukan data pembanding dari perusahaan lain maupun standar industri sebagaimana konsep analisis rasio keuangan. Ketiga, konsep EVA sebagai pengukur kinerja perusahaan

memperhatikan harapan penyedia dana secara adil di mana derajat keadilannya dinyatakan dengan ukuran tertimbang struktur modal yang ada dan berpedoman pada nilai pasar bukan pada nilai buku. Keempat, penerapan konsep EVA yang praktis merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi pebisnis untuk mengambil keputusan dan kebijaksanaan permodalan. Kelima, EVA dapat digunakan sebagai tolok ukur pemberian bonus pada karyawan. Keenam, konsep EVA mempengaruhi keputusan organisasi untuk keluar dari unit usaha yang mempunyai *negative value added*.

Dalam akuntansi manajemen, EVA sebagai alat untuk menilai kinerja (*performance*) suatu pusat investasi. EVA merupakan alternatif yang lebih baik dalam menilai kinerja manajer divisi dibandingkan dengan *Return on Investment* (ROI) karena EVA memasukkan semua unsur dalam laporan laba/rugi dan neraca perusahaan sedangkan ROI hanya fokus pada salah satu ukuran pertumbuhan seperti pertumbuhan pendapatan dan rasio tingkat kembalian investasi. EVA mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus mengeliminasi rekayasa keuangan. Nilai tambah ini tercipta apabila perusahaan memperoleh keuntungan (*profit*) di atas *cost of capital* perusahaan. EVA dikatakan mengeliminasi rekayasa keuangan karena EVA mengukur berapa nilai tambah ekonomis yang terjadi tiap periodenya karena memperhitungkan biaya modal yang harus dikeluarkan perusahaan sehingga lebih mencerminkan nilai perusahaan yang sebenarnya.

Penilaian kinerja perusahaan sangat penting karena sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang terkait terutama bagi para

investor yang digunakan sebagai acuan untuk mengalokasikan dan menanamkan modalnya. Kinerja perusahaan yang baik akan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat dilihat dari sisi pasar yang diukur dengan menggunakan Tobin's Q sebagai ukuran penilaian pasar (Klapper dan Love, 2002).

Penelitian ini menggunakan studi kasus pada PT. Bank Niaga Tbk yang terdaftar dalam IICG selama tahun 2003-2007. Melihat prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh penerapan *good corporate governance* dan menganalisis kondisi perusahaan setelah menerapkan *good corporate governance* yang diukur dengan menggunakan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) terhadap kinerja perusahaan, yang diukur dengan menggunakan *Economic Value Added* (EVA) dan terhadap *Tobin's Q*. Mengetahui pentingnya hal tersebut maka penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan pihak yang berkepentingan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap EVA?
2. Apakah EVA berpengaruh terhadap *Tobin's Q*?
3. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap *Tobin's Q*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menguji bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap EVA.
2. Pengaruh penerapan EVA terhadap *Tobin's Q*.
3. Pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap *Tobin's Q*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan *go public* di Bursa Efek Indonesia yang belum menerapkan *good corporate governance*

Memunculkan kesadaran tentang pentingnya *good corporate governance* beserta efek positif dari penerapan prinsip tersebut sehingga diharapkan dapat menerapkan *good corporate governance* di tiap-tiap perusahaan.

2. Bagi calon investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi calon investor dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi, dilihat dari *good corporate governance*, EVA dan *Tobin's Q*.